



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 344 9230, TELEKS 45799, FAKSIMILE (021) 384 6402, 384 9326

Nomor : S-7612.1/PB.1/2017 30 Agustus 2017
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permintaan Usulan Penetapan Status Rumah Negara Golongan I/Rumah Jabatan pada Kantor Vertikal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan

Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
Terlampir
Di Tempat


Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara khususnya terkait penggunaan dan penghunian Rumah Negara di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara antara lain ditetapkan bahwa, Barang Milik Negara berupa Rumah Negara harus dilakukan penetapan status penggunaan oleh Pengelola Barang. Rumah Negara Golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tersebut.
2. Mengingat sampai saat ini masih ada rumah negara yang dipergunakan oleh Kepala Kantor Vertikal Lingkup Ditjen Perbendaharaan yang belum ditetapkan status penggunaannya sebagai Rumah Negara Golongan I/Rumah Jabatan, maka dengan memperhatikan analisa kebutuhan peruntukan rumah negara pada Kantor Vertikal di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan serta agar penggunaan rumah negara sesuai peruntukannya, perlu dilakukan pendataan kembali satuan kerja yang berada di wilayah kerja Saudara yang belum mengusulkan penetapan status Rumah Negara Golongan I/Rumah Jabatan dan yang sudah mengusulkan penetapan dimaksud akan tetapi sampai saat ini belum mendapat Surat Keputusan Penetapan agar mengajukan permohonan kembali.
3. Sesuai surat dari Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Nomor S-1377/SJ.7/2017 tanggal 08 Agustus 2017 hal Pengembalian Berkas Permohonan Usulan Penetapan Status Rumah Negara Golongan I/Rumah Jabatan di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-63/PB/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usul penetapan status penggunaan Barang Milik Negara berupa Bangunan dalam pengurusannya kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan dilengkapi dokumen pendukung (dalam rangkap 2) sebagai berikut :
 - a. Daftar Barang Milik Negara (BMN) dan Spesifikasi BMN yang diusulkan untuk ditetapkan status penggunaannya yang juga memuat informasi mengenai kelengkapan bangunan (listrik, air, telepon, gas dan pagar) sesuai format terlampir;
 - b. Kartu Identitas Barang (KIB) yang telah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang;

- c. Laporan Kondisi Barang (LKB) yang telah ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Barang;
- d. Gambar legger/arsip rumah;
- e. Gambar situasi/denah rumah;
- f. Foto rumah berwarna;
- g. Fotokopi sertifikat tanah dan Surat Keterangan Kebenaran Fotokopi Sertifikat sesuai format terlampir;
- h. Fotokopi IMB / Fotokopi dokumen perolehan / fotokopi dokumen lainnya (misal : BAST) dan Surat Keterangan Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan, Dokumen Perolehan Bangunan dan Berita Acara Serah Terima Bangunan sesuai Format terlampir;
- i. Dikecualikan terhadap BMN berupa bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dokumen perolehan, dan/atau dokumen lainnya, dokumen tersebut dapat diganti dengan Surat pernyataan bermeterai bahwa Rumah Negara tersebut dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai format terlampir.
- j. Checklist Kelengkapan Dokumen Usulan Penetapan Status Rumah Negara Golongan I / Rumah Jabatan dari Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sesuai format terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris,


Haryana
NIP 196006031985021001

Tembusan :

Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;